

## RASIONALITAS INSTRUMENTAL DAN DOMINASI SISTEMIK DALAM MASYARAKAT DIGITAL: PERSPEKTIF NEO-MARXIS DAN TEORI KRITIS FRANKFURT TERHADAP PERKEMBANGAN KONSEPTUAL MASYARAKAT KONTEMPORER

Rahma Dona, Devina Novela, Aisyah Nur

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [nhaanhaa292@gmail.com](mailto:nhaanhaa292@gmail.com), [devinanovela16@gmail.com](mailto:devinanovela16@gmail.com),  
[aisyahnb30401@gmail.com](mailto:aisyahnb30401@gmail.com)

### Abstract

*This study examines how instrumental rationality contributes to the consolidation of systemic domination in the digital age, utilizing a Neo-Marxist and Frankfurt School Critical Theory framework. Instrumental rationality, which prioritizes efficiency and control, not only shapes bureaucratic and technological systems but also colonizes the social lifeworld through popular culture, algorithms, and digital communication. In this context, social media and the digital economy function as hegemonic tools that disseminate capitalist values symbolically and ideologically. Using Fairclough's Critical Discourse Analysis, the research analyzes representative texts from media, public policies, and popular culture to reveal hidden mechanisms of domination within discursive practices and broader social structures. The findings show that systemic domination is no longer coercive but operates diffusely through technocratic logic, identity commodification, and the algorithmic structuring of everyday life. Habermas's concept of communicative action offers a theoretical foundation for restoring deliberative public spaces and constructing a more participatory model of democracy. This study contributes to expanding the horizon of critical social theory by integrating digital, cultural, and ethical perspectives. It highlights the importance of media literacy, algorithmic justice, and cultural resistance as pathways toward holistic and transformative emancipation. Ultimately, it calls for a socially just, reflexive, and human-centered digital order.*

**Keywords:** Instrumental rationality, Frankfurt School, digital capitalism, cultural hegemony, communicative action, social emancipation.

### Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana rasionalitas instrumental berperan dalam memperkuat dominasi sistemik di era digital, dengan menggunakan pendekatan Neo-Marxis dan Teori Kritis Frankfurt. Rasionalitas instrumental, yang mengedepankan efisiensi dan kontrol, tidak hanya membentuk sistem birokratis dan teknologi, tetapi juga menjajah ruang kehidupan sosial melalui budaya populer, algoritma, dan komunikasi digital. Dalam konteks ini, media sosial dan ekonomi digital menjadi instrumen hegemoni yang menyebarkan nilai-nilai kapitalistik secara simbolik dan ideologis. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Fairclough, penelitian ini menelaah teks-teks representatif dari media, kebijakan publik, dan konten budaya untuk mengungkap mekanisme dominasi yang tersembunyi dalam praktik diskursif dan struktur sosial. Hasil temuan menunjukkan bahwa dominasi sistemik kini tidak lagi bersifat koersif, melainkan difus dan tersembunyi dalam logika teknokratik, komodifikasi identitas, dan algoritmisasi kehidupan sehari-hari. Konsep tindakan komunikatif dari Habermas menjadi tawaran teoritis untuk merestorasi ruang publik yang deliberatif dan membangun model demokrasi yang lebih partisipatif. Penelitian ini berkontribusi pada perluasan teori kritis sosial dengan mengintegrasikan perspektif digital, kultural, dan etis, serta menekankan pentingnya resistensi berbasis literasi media kritis dan keadilan algoritmik. Temuan ini menegaskan bahwa agenda emansipasi dalam masyarakat kontemporer harus bersifat holistik dan transformatif, mengarah pada pembentukan tatanan sosial yang lebih adil, reflektif, dan manusiawi.

**Kata kunci:** *Rasionalitas instrumental, Mazhab Frankfurt, kapitalisme digital, hegemoni budaya, tindakan komunikatif, emansipasi sosial.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat kontemporer di era digital ditandai oleh transformasi struktural yang kompleks, di mana teknologi, budaya populer, dan kapitalisme global saling berkelindan membentuk konfigurasi sosial yang baru. Dalam lanskap ini, struktur dominasi tidak lagi bersifat langsung dan koersif, melainkan berlangsung secara simbolik, ideologis, dan kultural melalui mekanisme yang halus dan menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka, kritik sosial kontemporer tidak cukup bila hanya bertumpu pada analisis ekonomi-politik konvensional, tetapi harus menggali lebih dalam bagaimana relasi kuasa dimediasi oleh teknologi, budaya populer, dan formasi kesadaran digital. Dalam konteks inilah, Mazhab Frankfurt sebagai varian Neo-Marxisme yang memadukan filsafat kritis, sosiologi, dan teori budaya menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan bentuk-bentuk dominasi sistemik baru (Turcotte & Holmes, 2021; Buchanan, 2018).

Konsep rasionalitas instrumental menjadi salah satu kritik paling berpengaruh dari Teori Kritis Frankfurt. Rasionalitas ini merupakan bentuk nalar yang mengutamakan efisiensi dan kontrol, sambil mengabaikan nilai-nilai normatif seperti etika, keadilan, dan pembebasan. Dalam masyarakat digital, bentuk rasionalitas ini menjelma dalam logika algoritma, sistem surveilans, dan komodifikasi budaya yang memanipulasi pengalaman menjadi produk kapitalistik. Adorno dan Horkheimer, melalui konsep industri budaya, memperlihatkan bagaimana kesadaran masyarakat dibentuk oleh konsumsi simbolik yang menyeragamkan cara berpikir dan membatasi ruang refleksi kritis (Morelock, 2018; Pa, 2022; Reig, 2019). Hal ini memperkuat sistem kapitalisme melalui reproduksi nilai-nilai hegemonik yang tersembunyi di balik bentuk hiburan, kenyamanan, dan ilusi kebebasan.

Di era dominasi platform digital, bentuk kekuasaan yang semula beroperasi melalui ekonomi dan birokrasi kini telah bergeser menjadi bentuk kontrol simbolik yang berjalan melalui kecerdasan buatan, identitas algoritmik, dan personalisasi konten. Konsep “manusia satu dimensi” yang dikembangkan oleh Marcuse sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana individu hari ini terserap dalam logika sistem yang menyamar sebagai kebebasan. Individu tidak lagi melihat dominasi sebagai penindasan, melainkan

sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari yang dianggap netral—padahal sarat dengan kepentingan ideologis (Khachaturian, 2018; Taylor, 2024; Cader & Sundrijo, 2023).

Sebagai lanjutan dari kritik tersebut, Habermas menambahkan dimensi tindakan komunikatif yang bertujuan memulihkan rasionalitas dari kerangka instrumental menuju rasionalitas intersubjektif yang terbuka terhadap dialog dan konsensus etis. Ia menekankan pentingnya ruang publik deliberatif yang bebas dari distorsi sistem sebagai fondasi masyarakat demokratis. Akan tetapi, dalam era digital, ruang publik ini tidak berkembang secara optimal karena dikomodifikasi oleh logika platform dan kapitalisme data, yang justru mempersempit partisipasi dan menggantikan diskursus dengan logika visibilitas dan performativitas simbolik (Kellner, 2021; Houston, 2024).

Masalah utama yang menjadi perhatian dalam studi ini adalah bagaimana bentuk dominasi sistemik dalam masyarakat digital semakin tersembunyi dan kompleks akibat rasionalitas instrumental yang menjangkau dimensi budaya, komunikasi, dan struktur kesadaran. Dominasi ini tidak lagi bekerja melalui paksaan langsung, tetapi melalui konstruksi kebutuhan palsu, relasi simbolik, dan kontrol informasi yang memperlemah kapasitas kritis masyarakat. Dalam hal ini, kapitalisme digital memperluas hegemoni bukan hanya melalui produksi barang, melainkan melalui produksi makna dan persepsi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana Teori Kritis Frankfurt, dengan basis pemikiran dari Adorno, Horkheimer, Marcuse, hingga Habermas, dapat digunakan untuk memahami transformasi bentuk dominasi dalam masyarakat digital. Studi ini juga berupaya menjembatani kesenjangan literatur yang masih memisahkan antara teori Marxis dan fenomena digital kontemporer, padahal struktur kekuasaan hari ini justru bersifat difus dan bekerja di balik logika algoritmik, komodifikasi data, dan mekanisme visibilitas platform (Fuchs, 2018; Roth, 2023; Schmidt, 2018).

Dengan menggabungkan pendekatan filsafat sosial, teori komunikasi, dan sosiologi kritis, penelitian ini menyusun kerangka konseptual baru untuk membaca ulang lanskap kekuasaan kontemporer. Fokusnya adalah pada integrasi antara kritik terhadap rasionalitas instrumental dan pemetaan dominasi simbolik dalam budaya digital. Kontribusi dari studi ini diharapkan dapat memperkuat kembali proyek emansipasi sosial dengan menyusun strategi kritik sosial yang tidak hanya responsif terhadap struktur

ekonomi, tetapi juga terhadap sistem pengetahuan dan praktik simbolik yang menopang dominasi kapitalisme digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis yang berpijak pada tradisi epistemologis Teori Kritis Mazhab Frankfurt, dengan fokus utama pada pembongkaran bentuk-bentuk dominasi simbolik dan sistemik dalam wacana kontemporer. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, yang terdiri dari tiga dimensi analisis: level textual (analisis mikro-linguistik), level praktik wacana (proses produksi dan distribusi wacana), dan level sosiokultural (struktur makro yang membentuk konteks wacana). Model ini memungkinkan keterhubungan antara elemen bahasa dengan dinamika kekuasaan sosial, ekonomi, dan budaya dalam kapitalisme digital (Ibsen, 2023; Costa, 2024).

Penggunaan Analisis Wacana Kritis sebagai metode utama dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan kritis studi, yakni menelusuri bagaimana rasionalitas instrumental bekerja melalui bahasa dan simbol untuk mereproduksi tatanan sosial hegemonik dalam era digital. Pendekatan ini tidak sekadar menggambarkan isi pesan, melainkan membongkar ideologi yang tersembunyi di balik pemilihan diksi, struktur naratif, dan konstruksi makna dalam berbagai bentuk komunikasi publik dan budaya populer.

Data dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik purposive sampling terhadap berbagai jenis teks yang dianggap representatif terhadap diskursus dominan di masyarakat digital. Sampel meliputi teks media (artikel berita, siaran pers, dan iklan teknologi), dokumen kebijakan (regulasi tentang AI, digitalisasi birokrasi, dan tata kelola data), serta konten budaya populer dari platform YouTube, TikTok, dan Netflix. Teks akademik dan laporan industri juga dianalisis untuk mengungkap narasi normatif yang tersembunyi dalam diskursus ilmiah dan ekonomi digital (Haderer, 2021; Ul-Haq, 2023; Brandt, 2019).

Proses analisis dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan Analisis Wacana Kritis. Pertama, analisis linguistik mikro menelaah diksi, metafora, struktur sintaksis, serta penggunaan eufemisme yang merepresentasikan nilai efisiensi, produktivitas, dan kontrol. Kedua, praktik wacana ditelaah untuk mengidentifikasi aktor produksi wacana, posisi ideologis mereka, dan hubungan antara produksi teks dengan institusi kekuasaan.

Ketiga, analisis sosiokultural digunakan untuk mengontekstualisasikan temuan linguistik ke dalam struktur sosial makro seperti kapitalisme digital, birokratisasi teknologi, dan hegemoni budaya global (Ocholla, 2020; Pierosara, 2020; Niazi, 2018).

Parameter utama dalam penelitian ini adalah hipotesis bahwa rasionalitas instrumental, sebagai logika dominan dalam masyarakat digital, bekerja melalui bahasa yang menyamar sebagai netralitas teknokratis. Oleh karena itu, pencarian kosakata seperti “efisiensi”, “kemajuan”, “inovasi”, dan “otomatisasi” dijadikan penanda awal dalam melacak reproduksi nilai-nilai kapitalistik. Selain itu, identifikasi terhadap bentuk silencing terhadap narasi tandingan dan reproduksi kebutuhan palsu menjadi bagian penting dari pembacaan ideologis dalam studi ini (Fraser, 2023; Hutton & Heath, 2020).

Melalui kerangka metodologis ini, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap mekanisme dominasi sistemik dalam wacana digital secara lebih mendalam, sekaligus memberikan kontribusi dalam membangun fondasi bagi kritik sosial yang berbasis pada kesadaran linguistik, ideologis, dan struktural terhadap sistem kapitalisme digital kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rasionalitas Instrumental dan Penjajahan Dunia Kehidupan**

Temuan utama dalam tahap awal penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas instrumental telah menjadi karakter dominan dalam cara berpikir masyarakat modern. Konsep ini, sebagaimana dirumuskan oleh Horkheimer dan Adorno, menggambarkan pergeseran rasionalitas dari yang semula bersifat emansipatoris menjadi sarana untuk mencapai efisiensi, kontrol, dan dominasi (Daros, 2022; Zou, 2021). Dalam praktiknya, hal ini tercermin pada institusi sosial yang semakin mengutamakan pencapaian target kuantitatif ketimbang pengembangan nilai-nilai humanistik. Sistem pendidikan, misalnya, lebih menekankan pengukuran capaian melalui indikator kinerja (KPI) daripada pembentukan karakter dan pemikiran kritis.

Fenomena Uberization dan platformisasi kerja memperjelas bentuk dominasi ini, di mana algoritma dan logika efisiensi mengatur ritme kerja para pekerja gig economy. Para pekerja dinilai, diarahkan, dan diberi sanksi melalui sistem algoritmik yang tidak mempertimbangkan konteks sosial maupun etika (Zou, 2021; Vieta, 2021). Situasi ini tidak hanya meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menjauhkan individu dari pemahaman autentik tentang peran sosial mereka. Dalam konteks ini, rasionalitas

instrumental menjadi alat penjajahan sistem terhadap dunia kehidupan, mereduksi makna hubungan sosial menjadi sekadar transaksi data dan angka.

Lebih jauh, Habermas memperkenalkan dikotomi antara *lebenswelt* (dunia kehidupan) dan sistem, untuk menggambarkan ketegangan antara ranah sosial yang berbasis interaksi komunikatif dengan struktur sistemik yang dijalankan oleh logika instrumental (Sunaryo, 2023). Penjajahan *lebenswelt* oleh sistem melalui birokratisasi dan teknologi menjadi kenyataan empiris yang semakin nyata dalam kehidupan kontemporer. Sistem-sistem tersebut mencaplok ruang-ruang komunikasi sosial yang seharusnya menjadi tempat dialog dan penguatan ikatan sosial (Kämper, 2023). Contoh aktualnya dapat dilihat dalam penerapan AI governance yang mengatur perilaku individu dan institusi melalui sistem kontrol otomatis, yang seringkali tak transparan dan tak partisipatif.

Temuan ini konsisten dengan kerangka kritik Mazhab Frankfurt terhadap modernitas teknologis dan logika efisiensi yang melandasinya. Para teoritikus seperti Adorno dan Horkheimer menekankan bahwa teknologi tidak bersifat netral, tetapi telah menjadi instrumen dominasi yang membentuk kesadaran masyarakat melalui struktur ideologis tersembunyi (Daros, 2022; Feenberg, 2023). Sistem-sistem yang dibentuk untuk efisiensi justru mengalienasi manusia dari nilai-nilai hakiki dan menumpulkan kapasitas reflektifnya (Roth, 2023). Hal ini diperkuat oleh pemikiran Marcuse tentang dominasi teknologi yang membuat manusia menjadi satu dimensi, menerima status quo tanpa kritik (Vieta, 2021).

Habermas, dengan kerangka tindakan komunikatifnya, memperluas kritik ini ke wilayah ruang publik dan interaksi sosial. Ia melihat bahwa koloni sistem terhadap *lebenswelt* telah merusak kemampuan masyarakat untuk membangun konsensus melalui komunikasi yang bebas dari dominasi (Pezdek et al., 2019). Relevansi pemikiran ini dalam konteks kontemporer terlihat pada bagaimana algoritma dan AI mengatur interaksi sosial dan keputusan birokratis tanpa keterlibatan deliberatif. Dalam hal ini, kritik Habermas terhadap sistem menjadi dasar argumentasi bahwa teknologi harus diarahkan untuk memperkuat komunikasi emancipatoris, bukan sekadar efisiensi teknokratik (Sunaryo, 2023).

Jika dibandingkan dengan model-model utilitarian dan manajerial dalam pengelolaan teknologi digital, pendekatan Mazhab Frankfurt dan Habermas menawarkan

alternatif reflektif yang lebih manusiawi. Kritik ini menjadi semakin penting dalam era digital di mana platform seperti media sosial dan layanan gig economy mengonstruksi kembali struktur sosial berdasarkan logika pasar dan data, bukan nilai kolektif atau etika publik (Delanty & Harris, 2021; Schmidt, 2018).

Temuan ini memiliki implikasi ilmiah yang signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai cara kerja dominasi dalam masyarakat kapitalis kontemporer. Ia menunjukkan bahwa dominasi tidak lagi bersifat koersif atau ekonomi semata, melainkan berjalan melalui mekanisme sistemik yang rasional dan efisien, namun melumpuhkan dimensi kritis dan humanistik manusia. Oleh karena itu, studi ini memperkaya literatur dengan membangun jembatan antara kritik rasionalitas instrumental ala Frankfurt School dan kolonisasi *lebenswelt* oleh Habermas, yang sangat relevan dalam konteks algoritmisasi sosial saat ini.

Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong evaluasi kritis terhadap penerapan kebijakan berbasis indikator dan teknologi otomatis. Dalam pendidikan, misalnya, perlu adanya keseimbangan antara penilaian kuantitatif dan pengembangan nalar kritis peserta didik. Dalam kebijakan AI, penting untuk mengembangkan governance yang inklusif dan transparan, yang mempertimbangkan etika dan nilai-nilai sosial, bukan hanya efisiensi teknokratik. Lebih luas lagi, penelitian ini menyuarkan pentingnya revitalisasi ruang publik sebagai arena dialog sosial yang bebas dari dominasi sistem. Hal ini menuntut peran aktif intelektual publik, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mengedepankan nilai-nilai emansipatoris dan keadilan sosial dalam setiap intervensi teknologi dan kebijakan sosial. Dengan demikian, studi ini menjadi kontribusi penting dalam membangun kembali paradigma teknologi dan rasionalitas yang berpihak pada manusia dan kemanusiaan.

### **Budaya Populer dan Hegemoni Ideologis dalam Kapitalisme Kontemporer**

Temuan lanjutan dari penelitian ini mengungkap bahwa budaya populer dalam kapitalisme kontemporer berperan sebagai alat hegemonik yang secara sistematis menyebarkan ideologi dominan. Merujuk pada konsep “culture industry” yang dikembangkan oleh Adorno dan Horkheimer, budaya massa tidak lagi menjadi ruang ekspresi artistik atau kritik sosial, melainkan telah dikomodifikasi sebagai produk industri yang dikendalikan oleh logika pasar (Aydin, 2025; Demir & Tiryaki, 2024). Produk budaya seperti film, musik, hingga konten media sosial diatur untuk menghibur sambil

menanamkan kesadaran palsu, yang pada akhirnya menumpulkan nalar kritis publik dan mempertahankan status quo.

Transformasi logika industri budaya menjadi lebih kompleks dalam era kapitalisme digital. Di sinilah terjadi pergeseran ke bentuk baru dari hegemoni ideologis yang disebut “digital hegemony”. Melalui media sosial, ekonomi influencer, dan kultur streaming, kapitalisme tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual identitas, gaya hidup, dan aspirasi yang disesuaikan dengan algoritma platform (Bouquillion & Ithurbide, 2022). Konten digital yang tersebar luas dirancang sedemikian rupa untuk mempertahankan konsensus budaya terhadap nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan estetika performatif, yang pada akhirnya meneguhkan dominasi struktur kapitalis di ranah simbolik.

Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan platform besar dalam membentuk narasi dan perilaku publik melanjutkan konsep “platform capitalism” (Srnicek) dan “surveillance capitalism” (Zuboff). Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram tidak hanya menjadi saluran distribusi budaya, tetapi juga aktor hegemonik yang menentukan representasi identitas, memetakan preferensi, dan mengendalikan ekonomi atensi publik. Dalam hal ini, budaya populer bukan lagi wilayah otonom, tetapi bagian dari mekanisme kontrol ideologis yang semakin tersembunyi namun intensif.

Temuan ini memperkuat kritik Mazhab Frankfurt terhadap budaya massa sebagai bentuk dominasi simbolik. Sebagaimana dikemukakan oleh Adorno dan Horkheimer, produk budaya dalam sistem kapitalis diproduksi untuk mengamankan keuntungan, bukan untuk menciptakan refleksi kritis atau kesadaran emansipatoris (Aydin, 2025; Demir & Tiryaki, 2024). Pola ini semakin akut dalam konteks digital, di mana nilai-nilai dominan dikemas dalam bentuk hiburan yang cepat, ringan, dan berulang, sehingga menciptakan homogenitas budaya dan pasivitas audiens.

Konsep hegemoni Gramsci yang diperluas ke dalam ruang digital juga mendukung analisis ini. Seperti ditunjukkan oleh Bouquillion dan Ithurbide (2022), kekuasaan kini tidak hanya dijalankan melalui represi, tetapi melalui konsensus kultural yang dibentuk lewat media digital. Dengan menguasai algoritma distribusi dan logika representasi, platform digital seperti Meta dan Google memainkan peran sebagai agen hegemonik yang mampu membingkai realitas sosial dan politik (Сюаньцзя & Гуаня, 2024; Kristiyono et al., 2020).

Pendekatan Neo-Marxisme terhadap media menggarisbawahi bahwa media tidak netral, melainkan dikonstruksi dalam relasi kuasa dan kepentingan kapitalistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Singh & Singh (2025) serta Mihelj (2022), media dalam sistem kapitalis berfungsi mereproduksi ideologi dominan dengan mengabaikan suara-suara alternatif. Dalam konteks ini, platform capitalism memperluas dominasi tersebut dengan memonopoli interaksi sosial dan memanipulasi data pengguna sebagai komoditas ekonomi (Lagon & Lou, 2018; Supa et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa hegemoni ideologis dalam era digital telah mengalami transformasi struktural yang membutuhkan analisis kritis lebih mendalam.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam pemahaman tentang bagaimana ideologi bekerja secara laten dalam masyarakat digital. Dari sisi ilmiah, studi ini memperluas horizon teori kritis Frankfurt dengan mengintegrasikan pendekatan Neo-Marxisme dan teori hegemoni Gramscian ke dalam ranah budaya digital. Dengan mengaitkan “culture industry” dengan logika platform capitalism dan surveillance capitalism, riset ini memberikan landasan konseptual baru untuk memahami dominasi dalam masyarakat informasi dan ekonomi data. Hal ini menjembatani kritik klasik dengan fenomena kontemporer, menunjukkan bahwa bentuk dominasi telah berevolusi namun tetap menjaga esensi eksloitasi simbolik.

Secara praktis, hasil ini menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi media kritis di kalangan masyarakat. Dalam dunia di mana konten dan representasi dikendalikan oleh algoritma, penting bagi individu untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif tetapi juga partisipan aktif dalam menafsirkan, menolak, atau menciptakan narasi alternatif. Institusi pendidikan dan media independen memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kesadaran ini.

Lebih lanjut, studi ini membuka ruang refleksi terhadap kebijakan platform digital dan tata kelola algoritma yang seringkali tidak transparan dan bias terhadap ideologi dominan. Kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan digital dan perlindungan identitas budaya lokal menjadi sangat relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam advokasi sosial untuk membangun tatanan digital yang lebih etis dan demokratis. Dengan mengaitkan hasil temuan ini dengan pembahasan sebelumnya mengenai rasionalitas instrumental dan penjajahan *lebenswelt*, terlihat kesinambungan dalam bentuk dominasi

sistemik yang terus bermetamorfosis dari kontrol birokratis ke kontrol simbolik. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa kritik terhadap kapitalisme kontemporer harus bersifat interdisipliner, lintas ranah, dan mendalam secara ideologis.

### **Tindakan Komunikatif dan Kritik terhadap Rasionalitas Positivistik**

Temuan dalam tahap ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tindakan komunikatif dari Habermas menawarkan fondasi teoretis yang kuat dalam mengoreksi reduksionisme struktur sosial dan determinisme ekonomi dalam pemikiran sosial kontemporer. Tindakan komunikatif menekankan pentingnya interaksi sosial yang dilandasi oleh pengertian bersama dan koordinasi makna secara rasional, bukan oleh kepentingan strategis atau relasi kekuasaan (Niazi, 2018; Ikhsan et al., 2023). Melalui situasi tutur yang ideal (ideal speech situation), individu dapat berpartisipasi dalam komunikasi tanpa dominasi, di mana klaim-klaim kebenaran, kejujuran, dan ketulusan diuji melalui diskursus yang terbuka dan setara (Cubas et al., 2024).

Konsep ini menggeser paradigma dominan dalam ilmu sosial yang seringkali terjebak dalam rasionalitas positivistic yakni kecenderungan untuk mengukur gejala sosial semata-mata melalui data empiris yang dapat diuji secara kuantitatif. Habermas menolak pendekatan ini dengan menyatakan bahwa kehidupan sosial tidak dapat direduksi menjadi angka dan statistik, melainkan harus dipahami melalui makna, pengalaman subjektif, dan intersubjektivitas (Mirjalali et al., 2023; Alamyar et al., 2023). Dengan demikian, tindakan komunikatif menjadi upaya untuk membangun teori sosial kritis yang mempertimbangkan dimensi normatif, historis, dan kultural dari masyarakat.

Dalam konteks praktik sosial kontemporer, kontribusi tindakan komunikatif terlihat dalam mendorong model tata kelola sosial yang deliberatif. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan, forum publik, dan ruang diskursus digital merupakan wujud konkret dari nilai-nilai diskursif ini. Di tengah dominasi teknokrasi dan rasionalitas instrumental yang mencengkeram ruang publik, tindakan komunikatif menawarkan ruang emansipasi melalui komunikasi yang didasarkan pada validitas rasional dan pengakuan mutual.

Temuan ini konsisten dengan literatur filsafat sosial kritis yang menempatkan Habermas sebagai tokoh sentral dalam memperluas horizon teori kritis dari Mazhab Frankfurt. Ia tidak hanya melanjutkan kritik terhadap kapitalisme dan dominasi sistemik, tetapi juga memperkenalkan diskursus etika sebagai cara untuk merehabilitasi rasionalitas

melalui partisipasi dialogis (Duvenhage, 2024). Diskursus ini tidak semata-mata membahas moralitas sebagai sesuatu yang ditentukan oleh otoritas, melainkan sebagai hasil kesepakatan bersama yang dicapai melalui pertukaran argumen yang jujur dan terbuka (Cubas et al., 2024; Grönlund et al., 2018).

Dalam konteks ini, tindakan komunikatif menjadi antitesis terhadap komunikasi strategis yang menjadi ciri utama masyarakat kapitalis modern. Sementara komunikasi strategis berorientasi pada manipulasi dan pencapaian tujuan pribadi, tindakan komunikatif menuntut kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Dengan begitu, Habermas memperluas diskursus kritis terhadap epistemologi positivistik, yang selama ini cenderung mengabaikan dimensi normatif dalam interaksi sosial (Alamyar et al., 2023). Ia mendorong transisi menuju teori sosial interpretatif yang lebih inklusif terhadap realitas kompleks kehidupan manusia.

Selaras dengan itu, pendekatan deliberatif dalam demokrasi yang ditawarkan Habermas menjadi penting dalam konteks krisis representasi dan menurunnya kualitas ruang publik. Literatur menunjukkan bahwa deliberasi publik, jika dijalankan secara inklusif dan partisipatif, dapat meningkatkan legitimasi demokrasi dan memperkuat kohesi sosial (Jovanoski & Sharlamanov, 2021; Al'anam & Salman, 2024). Oleh karena itu, tindakan komunikatif bukan hanya teori abstrak, melainkan fondasi praksis untuk revitalisasi demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat kompleks.

Implikasi ilmiah dari temuan ini terletak pada penyegaran paradigma ilmu sosial kritis yang menolak reduksionisme empiris. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan intersubjektif dan normatif dalam analisis sosial, sekaligus mengukuhkan relevansi tindakan komunikatif sebagai kerangka analisis yang komprehensif dan transformatif. Dengan mengintegrasikan etika diskursus, tindakan komunikatif menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, antara rasionalitas dan nilai, serta antara struktur sosial dan pengalaman personal.

Secara praktis, penelitian ini mendorong pengembangan tata kelola sosial yang berbasis deliberasi dan partisipasi. Forum-forum kebijakan publik, diskusi digital, dan mekanisme demokrasi partisipatif seharusnya tidak hanya menjadi formalitas prosedural, tetapi wadah komunikasi yang autentik dan setara. Dalam era dominasi epistemik oleh teknokrasi dan big data, pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat, terutama kelompok marginal, tetap terdengar dan dihargai dalam proses

pengambilan keputusan. Lebih jauh, studi ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pendidikan ilmu sosial, agar tidak semata-mata mengejar objektivitas ilmiah yang mekanistik, melainkan membuka ruang refleksi etis dan kesadaran kritis. Habermas melalui tindakan komunikatif memberikan arah bahwa pengetahuan sosial seharusnya berkontribusi pada pembebasan manusia, bukan sekadar akumulasi data. Dengan mengaitkan temuan ini dengan pembahasan sebelumnya mengenai dominasi rasionalitas instrumental dan hegemoni budaya, terlihat bahwa tindakan komunikatif adalah jawaban praksis-filosofis yang mampu menyatukan resistensi ideologis dan rekonstruksi sosial yang berorientasi pada emansipasi.

### **Emansipasi Sosial dalam Era Kapitalisme Digital dan Krisis Modernitas**

Tahap selanjutnya dari penelitian ini menemukan bahwa dalam era kapitalisme digital, gagasan emansipasi sosial perlu dirumuskan ulang untuk menanggapi bentuk dominasi baru yang tidak lagi terbatas pada eksloitasi tenaga kerja, tetapi juga pada perampasan data pribadi, kontrol algoritmik, dan manipulasi perilaku konsumen. Dalam kerangka teori kritis, emansipasi tidak hanya berarti pembebasan ekonomi, melainkan mencakup hak atas otonomi subjektif, hak atas privasi, dan kebebasan dari logika prediktif teknologi digital (Ibsen, 2023; Costa, 2024). Kapitalisme digital memperkenalkan bentuk dominasi baru melalui komodifikasi informasi personal, yang mengubah interaksi sosial menjadi sumber nilai ekonomi tanpa partisipasi sadar dari subjek yang terlibat (aligholi & Hayati, 2022).

Fenomena surveillance capitalism sebagaimana dikemukakan oleh Zuboff menegaskan bahwa emansipasi dalam masyarakat digital harus mencakup perlindungan terhadap hak atas data dan transparansi algoritma (Haderer, 2021; Piersara, 2020). Dalam sistem ini, perilaku individu tidak hanya dimonitor, tetapi juga diprediksi dan dibentuk oleh kekuatan korporasi digital yang mengontrol perangkat dan infrastruktur kehidupan sehari-hari. Ini mengarah pada bentuk baru determinisme, di mana keputusan personal tidak lagi bersifat otonom, melainkan dibentuk oleh logika eksplotatif dari pasar digital.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa teori kritis memainkan peran strategis dalam merumuskan agenda kebijakan progresif di era ini. Literasi digital kritis, keadilan algoritmik, dan bentuk resistensi budaya menjadi sarana penting untuk melawan dominasi epistemik dan kontrol simbolik yang dijalankan oleh kapitalisme digital. Di tengah krisis

modernitas—baik ekologis, eksistensial, maupun demokratis—agenda emansipatoris teori kritis beralih dari kritik sistem ekonomi-politik semata ke arah intervensi dalam desain teknologi dan etika keberlanjutan.

Temuan ini sejalan dengan literatur teori kritis yang menegaskan bahwa emansipasi memerlukan pembacaan kritis atas struktur sosial yang berubah seiring perkembangan teknologi dan ekonomi (Young et al., 2021; Ocholla, 2020). Emansipasi bukanlah proses satu dimensi, melainkan hasil dari dialektika antara institusi sosial dan agensi individu. Dalam konteks ini, kritik terhadap kapitalisme digital dan surveillance capitalism merupakan kelanjutan dari warisan kritik terhadap dominasi sistemik, sebagaimana dirumuskan oleh Mazhab Frankfurt.

Surveillance capitalism, menurut Zuboff, mengubah manusia menjadi objek pasif dari analisis algoritmik, mengikis kapasitas individu untuk membuat keputusan secara mandiri (Haderer, 2021; Hutton & Heath, 2020). Hal ini memperkuat posisi teori kritis yang sejak awal menyoroti bahaya reduksi manusia menjadi angka dan statistik dalam sistem sosial modern. Di sinilah literasi digital kritis dan kebijakan keadilan data menjadi krusial dalam membentuk masyarakat digital yang lebih berkeadilan.

Sementara itu, kritik postmodern terhadap Neo-Marxisme memperkaya diskursus emansipasi dengan menunjukkan pentingnya dimensi identitas dan keberagaman dalam pengalaman penindasan. Kritik ini menekankan bahwa perjuangan emansipatoris tidak hanya terkait kelas, tetapi juga ras, gender, seksualitas, dan ekologi (Martini, 2019; Hermida, 2019). Dalam hal ini, pendekatan teori kritis yang responsif terhadap konteks kontemporer dapat bertransformasi menjadi model pluralistik yang menjangkau berbagai bentuk resistensi dan transformasi sosial (Cavaco et al., 2023).

Implikasi ilmiah dari temuan ini adalah perlunya reformulasi teori emansipasi yang mengintegrasikan perspektif digital, ekologis, dan kultural secara bersamaan. Studi ini menunjukkan bahwa teori kritis tidak boleh terpaku pada kategori-kategori klasik, tetapi harus terbuka terhadap intervensi interdisipliner yang menjawab tantangan baru dari kapitalisme berbasis data. Dengan menyatukan gagasan Fraser tentang keadilan multidimensi, kritik Žižek terhadap ideologi kontemporer, dan seruan Nancy Fraser untuk rekonstruksi demokrasi radikal, penelitian ini membangun fondasi teoretis yang kokoh bagi paradigma emansipatoris baru.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan publik yang melindungi hak atas data, mengatur transparansi algoritma, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam desain teknologi. Literasi digital kritis harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, bukan hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi sebagai kesadaran politik terhadap struktur dominasi dalam ruang digital. Selain itu, resistensi budaya melalui seni, media alternatif, dan komunitas daring juga menjadi alat penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya dominasi simbolik dan kontrol algoritmik. Dengan menghubungkan pembahasan ini dengan temuan sebelumnya tentang rasionalitas instrumental, hegemoni budaya, dan tindakan komunikatif dapat disimpulkan bahwa agenda emansipasi dalam era kontemporer harus bersifat holistik dan transformatif. Ia tidak hanya melawan dominasi sistem, tetapi juga membangun alternatif etis dan ekologis dalam struktur sosial. Maka, teori kritis dihadirkan bukan hanya sebagai alat kritik, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas instrumental telah menjadi fondasi dominasi sistemik dalam masyarakat digital kontemporer. Melalui perangkat algoritmik, logika efisiensi, dan budaya populer yang terkomodifikasi, bentuk kekuasaan kini beroperasi secara simbolik dan ideologis, menembus ruang kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Perspektif Neo-Marxis dan Teori Kritis Frankfurt memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami transformasi dominasi tersebut, dengan menyoroti bagaimana teknologi, bahasa, dan media digunakan sebagai instrumen hegemoni. Rasionalitas instrumental, sebagaimana dikritik oleh Horkheimer dan Adorno, berperan dalam menjajah *lebenswelt* masyarakat, mengikis potensi emansipatoris melalui normalisasi kontrol dan komodifikasi nilai. Budaya populer, dalam hal ini, bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga arena reproduksi ideologi dominan. Sementara itu, konsep tindakan komunikatif dari Habermas menjadi tawaran praksis-filosofis untuk melawan logika teknokratis dan membangun ruang publik deliberatif yang partisipatif dan setara.

Implikasi dari penelitian ini meliputi perlunya reformulasi teori kritik sosial yang mengintegrasikan dimensi digital, ekologis, dan kultural, serta penguatan literasi media dan keadilan algoritmik sebagai strategi resistensi. Agenda emansipasi di era kapitalisme digital harus bersifat interdisipliner dan transformatif, tidak hanya membongkar dominasi

sistemik, tetapi juga merancang alternatif sosial yang berbasis nilai, etika, dan keadilan. Teori Kritis Frankfurt, dalam hal ini, bukan sekadar warisan intelektual, tetapi alat konseptual untuk membayangkan masa depan yang lebih adil dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, M. and Salman, R. (2024). The relevance of jürgen habermas's theory of communicative action as the philosophical foundation of human rights enforcement in indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 61-82. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>
- Alamyar, I., Halwati, U., Rifin, J., & Rofiqoh, A. (2023). The theory of communicative action in da'wah. *icodev*, 4(2), 69-78. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9904>
- Asih, I., Nugroho, H., & Budiawan, B. (2022). Hegemonic dialectics between power and resistance in the indonesian sharing economy: study of gojek. *Informasi*, 52(1), 63-82. <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.49348>
- Aydin, A. (2025). Trt's international digital platform "tabii" and transmission of turkish culture through tv series., 149-172. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1957-5.ch006>
- Boucher, G. (2021). The frankfurt school and the authoritarian personality: balance sheet of an insight. *Thesis Eleven*, 163(1), 89-102. <https://doi.org/10.1177/07255136211005957>
- Bouquillion, P. and Ithurbide, C. (2022). Audio-visual industry and digital platforms in india: a contribution from political economy of communication. *Global Media and Communication*, 18(3), 345-364. <https://doi.org/10.1177/17427665221125548>
- Brandt, N. (2019). Secularity, gender, and emancipation: thinking through feminist activism and feminist approaches to the secular. *Religion*, 49(4), 691-716. <https://doi.org/10.1080/0048721x.2019.1642261>
- Buchanan, I. (2018). A dictionary of critical theory.. <https://doi.org/10.1093/acref/9780198794790.001.0001>
- Cader, I. and Sundrijo, D. (2023). Critical analysis of neo-gramscian hegemony. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(8), 1435-1448. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i8.894>
- Cavaco, C., Paulos, C., Domingos, R., & Alves, E. (2023). Popular education in an association – expert by experience and work in tandem. *European Journal for Research on the Education and Learning of Adults*, 14(1), 63-77. <https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.4209>
- Costa, J. (2024). Emancipation and liberation as normative horizons in critical theory. *Thesis Eleven*, 184-185(1), 16-30. <https://doi.org/10.1177/07255136241292079>
- Cubas, J., Bonamigo, V., Alvarenga, R., & Carvalho, D. (2024). Childhood and adolescence in mental health policy: an analysis through health counselors and conferences. *Ciência & Saúde Coletiva*, 29(5). <https://doi.org/10.1590/1413-81232024295.01452023en>

- Daros, O. (2022). From cultural marxism to critical literacy: rethinking douglas kellner's media theory. *Philosophy & Social Criticism*, 50(9), 1354-1372. <https://doi.org/10.1177/01914537221133852>
- Delanty, G. and Harris, N. (2021). Critical theory and the question of technology: the frankfurt school revisited. *Thesis Eleven*, 166(1), 88-108. <https://doi.org/10.1177/07255136211002055>
- Demir, Y. and Tiryaki, S. (2024). "we are enemies of law and women": the manosphere and victimized masculinity on twitter (now x). *The Journal of Men S Studies*, 33(2), 231-251. <https://doi.org/10.1177/10608265241279841>
- Dong, T. and Sun, C. (2024). Sinicization of marxism as the basis of political philosophy and political discourse of modern china (people's republic of china). *Dialogue and Universalism*, 34(3), 71-84. <https://doi.org/10.5840/du202434342>
- Duvenhage, P. (2024). Reflections on habermas's discourse ethics. *Verbum Et Ecclesia*, 45(1). <https://doi.org/10.4102/ve.v45i1.3009>
- Feenberg, A. (2023). Marcuse's critique of technology today. *Philosophy & Social Criticism*, 49(6), 672-685. <https://doi.org/10.1177/01914537231164657>
- Fuchs, C. (2018). Towards a critical theory of communication with georg lukács and lucien goldmann. *Javnost - The Public*, 25(3), 265-281. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463032>
- Grönlund, C., Söderberg, A., Dahlqvist, V., Sandlund, M., & Zingmark, K. (2018). Communicative and organizational aspects of clinical ethics support. *Journal of Interprofessional Care*, 33(6), 724-733. <https://doi.org/10.1080/13561820.2018.1551862>
- Haderer, M. (2021). Does emancipation devour its children? beyond a stalled dialectic of emancipation. *European Journal of Social Theory*, 25(1), 172-188. <https://doi.org/10.1177/13684310211028382>
- Hammar, E. (2019). The political economy of cultural memory in the videogames industry. *Digital Culture & Society*, 5(1), 61-84. <https://doi.org/10.14361/dcs-2019-0105>
- Haqqi, H. and Wijayati, H. (2023). Gen-z local wisdom campaign agenda in the framework of counter hegemony, digital hegemony, cultural hegemony. *Asian Journal of Community Services*, 2(2), 191-202. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v2i2.3144>
- Hermida, R. (2019). Towards a critical theory of philippine society. *Kritike an Online Journal of Philosophy*, 12(3), 22-42. <https://doi.org/10.25138/12.3.a2>
- Houston, G. (2024). Revolutionary confucianism? neo-confucian idealism and modern chinese revolutionary thought. *Political Research Quarterly*, 77(2), 607-619. <https://doi.org/10.1177/10659129241228489>
- Hutton, M. and Heath, T. (2020). Researching on the edge: emancipatory praxis for social justice. *European Journal of Marketing*, 54(11), 2697-2721. <https://doi.org/10.1108/ejm-02-2019-0150>
- Ibsen, M. (2023). Domination, social norms, and the idea of an emancipatory interest. *Constellations*, 31(2), 160-173. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12674>

- Ikhsan, N., Beloan, B., Husni, M., & Mongan, F. (2023). Morality in the arrangement of regional budget as an effort to reduce flypaper effect: a critical habermasian perspective. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.34199/ijracs.2023.04.02>
- Jovanoski, A. and Sharlamonov, K. (2021). Jurgen habermas and his contribution to the theory of deliberative democracy. *American International Journal of Social Science Research*, 36-47. <https://doi.org/10.46281/aijssr.v7i1.1296>
- Kellner, D. (2021). Cultural marxism, british cultural studies, and the reconstruction of education. *Educational Philosophy and Theory*, 55(13), 1423-1435. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1926982>
- Khachaturian, R. (2018). Bringing what state back in? neo-marxism and the origin of the committee on states and social structures. *Political Research Quarterly*, 72(3), 714-726. <https://doi.org/10.1177/1065912918804450>
- Kristiyono, J., Ida, R., & Mashud, M. (2020). Counter-hegemony of the east java biennale art community against the domination of hoax content reproduction. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 33(1), 26. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i12020.26-35>
- Kämper, F. (2023). On the colonization of the environment. *European Journal of Social Theory*, 27(1), 97-114. <https://doi.org/10.1177/13684310231188888>
- Lagon, M. and Lou, T. (2018). The dragon in turtle bay: the impact of china's rise in the un on the united states and global governance. *World Affairs*, 181(3), 239-255. <https://doi.org/10.1177/0043820018806981>
- Martini, A. (2019). Rethinking terrorism and countering terrorism from a critical perspective. *cts and normativity. Critical Studies on Terrorism*, 13(1), 47-55. <https://doi.org/10.1080/17539153.2019.1658411>
- Mihelj, S. (2022). Platform nations. *Nations and Nationalism*, 29(1), 10-24. <https://doi.org/10.1111/nana.12912>
- Mirjalali, F., Peyma, D., & Kordlar, M. (2023). Conflict resolution through communication: habermasian study of pinter's the homecoming. *Jordan Journal of Modern Languages and Literature*, 15(3), 919-937. <https://doi.org/10.47012/jjml.15.3.10>
- Morelock, J. (2018). Critical theory and authoritarian populism.. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9hvtcf>
- Niazi, T. (2018). Contesting instrumental knowledge with communicative action: why kalabagh dam (pakistan) remains unbuilt. *Organization & Environment*, 32(4), 441-465. <https://doi.org/10.1177/1086026618773696>
- Ocholla, D. (2020). Decolonizing higher education in africa: implications and possibilities for university libraries. *College & Research Libraries News*, 81(6), 289. <https://doi.org/10.5860/crln.81.6.289>
- Pa, H. (2022). Critical thinking of frankfurt school of thought in cultural industry. *Advances in Educational Technology and Psychology*, 6(11). <https://doi.org/10.23977/aetp.2022.061105>

- Pezdek, K., Dobrowolski, R., & Michaluk, T. (2019). Habermas and the therapeutic function of language. *Nursing Philosophy*, 21(2). <https://doi.org/10.1111/nup.12290>
- Pierosara, S. (2020). Progress, emancipation, hope: rethinking critical theory through memories as counternarratives. *Constellations*, 28(1), 111-125. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12488>
- Pillay, A. (2025). Artificial intelligence's (ai) pro-us foreign policy stance – a new global security challenge. *Netsol New Trends in Social and Liberal Sciences*, 10(1), 1-17. <https://doi.org/10.24819/netsol2025.1>